

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara fundamental diarahkan untuk menjamin seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan belajar yang setara, berkualitas, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pendidikan tidak sekadar menjadi medium transmisi keilmuan, melainkan instrumen strategis dalam menstimulasi perkembangan holistik peserta didik yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun keterampilan sosial. Dalam orientasi ini, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), mendapatkan akses layanan pendidikan yang layak, adaptif, dan relevan dengan karakteristik kebutuhan spesifik mereka. Manifestasi tanggung jawab tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa negara wajib menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, memastikan pemerataan akses, serta menjamin kualitas pembelajaran yang bermakna bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) mempertegas komitmen negara dalam membiayai pendidikan dasar, yang merupakan wujud nyata keadilan sosial dan prinsip nondiskriminasi. Dalam cakrawala pendidikan modern, amanat konstitusi tersebut menuntut transformasi kebijakan dan inovasi manajemen pendidikan yang responsif terhadap diversitas peserta didik, sehingga konsep pendidikan inklusif dapat terimplementasi secara empiris, efektif, dan berkelanjutan.

Pemerintah mempertegas mandat konstitusional tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Regulasi ini mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan ruang bagi seluruh peserta didik dengan keberagaman karakteristik fungsional untuk mengikuti proses

pembelajaran secara kolaboratif dalam satuan pendidikan reguler. Secara manajerial, Permendiknas ini memberikan kewajiban fundamental bagi institusi pendidikan untuk melakukan rekayasa kurikulum, adaptasi instruksional, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta penguatan sistem tata kelola sekolah. Transformasi tersebut bertujuan agar satuan pendidikan mampu mengonstruksi lingkungan belajar yang inklusif, sehingga potensi unik setiap peserta didik dapat diaktualisasikan secara optimal dalam ekosistem pendidikan yang nondiskriminatif.

Implementasi pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki urgensi yang sangat krusial, mengingat fase ini merupakan *golden age* di mana fondasi perkembangan sosial-emosional anak diletakkan. Bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), pengembangan keterampilan sosial sering kali menjadi tantangan deterministik akibat hambatan dalam aspek komunikasi, interaksi, maupun regulasi emosi. Oleh karena itu, pendekatan inklusif di PAUD selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Regulasi tersebut menegaskan bahwa layanan PAUD harus diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu, yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta perlindungan. Dalam perspektif administrasi pendidikan, pendekatan holistik-integratif ini menuntut kapabilitas manajemen lembaga yang mampu mengorkestrasi berbagai sumber daya dan layanan pendukung guna mengoptimalkan tumbuh kembang seluruh peserta didik, termasuk ABK. Melalui pengelolaan lingkungan belajar yang inklusif di sekolah reguler, ABK distimulasi untuk mengembangkan kemampuan adaptasi dan bina diri agar dapat berfungsi secara mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, efektivitas pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan aksesibilitas, tetapi sangat ditentukan oleh determinasi manajemen satuan pendidikan dalam mengelola sistem secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

Regulasi manajemen PAUD inklusif menuntut adanya tata kelola kependidikan yang terencana, terorganisasi, terimplementasi, dan terevaluasi secara sistematis. Dalam cakrawala manajemen pendidikan modern, fungsi-fungsi

manajerial yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) menjadi instrumen fundamental untuk mengoperasionalkan kebijakan inklusif secara efektif. Fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan fase strategis yang melibatkan desain kurikulum adaptif, pelaksanaan asesmen komprehensif, serta penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang selaras dengan standar nasional PAUD. Tanpa perencanaan berbasis kebutuhan peserta didik, implementasi kebijakan inklusif berisiko terjebak pada formalitas administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sosial anak.

Fungsi pengorganisasian menuntut kapabilitas manajerial sekolah dalam mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana secara integratif, termasuk optimalisasi peran kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), serta kolaborasi dengan orang tua. Pengorganisasian yang efektif merupakan prasyarat terciptanya struktur kerja kolaboratif yang mendukung partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam ekosistem kelas. Pada aspek pelaksanaan (*actuating*), manajemen pendidikan inklusif diaktualisasikan melalui kepemimpinan instruksional dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memfasilitasi interaksi sosial positif melalui kegiatan bermain. Maka fungsi pengawasan (*controlling*) berperan vital dalam menjamin kualitas layanan melalui monitoring perkembangan sosial anak secara berkelanjutan dan evaluasi program yang terukur. Integrasi fungsi-fungsi manajemen ini menjadi determinan utama agar pendidikan inklusif mampu menghasilkan transformasi keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus sejak usia dini. Namun demikian, berbagai temuan empirik menunjukkan bahwa implementasi manajemen pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi diskrepansi antara tuntutan normatif dengan realitas operasional di satuan PAUD.

Penelitian-penelitian terdahulu, baik di tingkat internasional maupun nasional, umumnya lebih menekankan pada aspek pedagogis, sikap guru, atau model intervensi pembelajaran inklusif. Kajian yang secara spesifik mengaitkan manajemen pendidikan inklusif berbasis fungsi POAC dengan peningkatan keterampilan sosial ABK pada konteks PAUD masih relatif terbatas. Dengan kata

lain, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara tuntutan normatif kebijakan pendidikan inklusif dan praktik manajerial di satuan PAUD, khususnya dalam mendukung pengembangan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus.

Kesenjangan antara tuntutan regulasi dengan realitas operasional tersebut teridentifikasi melalui studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru pada tanggal 14-17 April 2026, ditemukan beberapa permasalahan fundamental dalam pengelolaan pendidikan inklusif yang ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen:

1. Pada fungsi perencanaan (*planning*), ditemukan bahwa meskipun regulasi mewajibkan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) berbasis hasil asesmen, faktanya kedua lembaga tersebut masih cenderung menggunakan perencanaan pembelajaran yang seragam dengan peserta didik reguler. Hal ini mengakibatkan kebutuhan spesifik anak berkebutuhan khusus (ABK) belum terakomodasi secara terstruktur dalam desain instruksional harian.
2. Pada aspek pengorganisasian (*organizing*), ditemukan kendala pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya ketiadaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Kondisi ini memaksa guru kelas menjalankan peran ganda (*dual role*) sebagai pengajar sekaligus *shadow teacher*. Akibat beban kerja yang tumpang tindih, guru cenderung memberikan penanganan terpisah kepada ABK agar tidak mengganggu ritme belajar kelas reguler.
3. Pada tahap pelaksanaan (*actuating*), prinsip inklusivitas yang seharusnya mendorong interaksi sosial antara ABK dengan teman sebaya belum berjalan optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa ABK sering kali dipisahkan dalam aktivitas belajar tertentu, sehingga menciptakan suasana eksklusif di dalam lingkungan inklusif. Praktik ini menghambat proses adaptasi sosial ABK dan membatasi peluang bagi anak umum untuk mengembangkan sikap empati serta penghargaan terhadap keberagaman.
4. Pada fungsi evaluasi (*controlling*), ditemukan bahwa indikator ketercapaian atau Tujuan Pembelajaran (TP) bagi ABK masih disamakan dengan standar

anak reguler. Ketidadaan diferensiasi dalam standar evaluasi ini menyebabkan progres perkembangan ABK sering kali dianggap stagnan atau tidak berkembang karena dipaksa memenuhi parameter penilaian yang tidak sesuai dengan karakteristik hambatan dan potensi mereka. Kondisi-kondisi empiris inilah yang mendasari pentingnya sebuah kajian mendalam mengenai manajemen pendidikan inklusif guna meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus.

Kondisi tersebut dipertegas oleh pernyataan beberapa guru dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 April 2026. Salah satu guru di TK Aisyiyah 2 mengungkapkan bahwa tantangan terbesar terletak pada minimnya kompetensi khusus dalam menangani keragaman hambatan anak, di mana beliau menyatakan: *"Kami kesulitan membagi fokus antara mengejar target kurikulum kelas dengan mendampingi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian intensif, apalagi tanpa bantuan GPK"*. Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara di TKIT Al Kautsar menunjukkan adanya keresahan mengenai keterbatasan sarana dan media pembelajaran yang adaptif. Guru di sekolah tersebut menjelaskan bahwa aktivitas sosial sering kali terhambat karena media yang tersedia belum dirancang untuk kebutuhan ABK, sehingga interaksi antara anak reguler dan ABK tidak terjadi secara alamiah. Data observasi juga memperlihatkan bahwa pada jam istirahat atau kegiatan bermain bebas, ABK cenderung asyik dengan dunianya sendiri atau hanya didampingi guru secara privat di sudut kelas, yang mengonfirmasi bahwa fungsi *actuating* dalam menggerakkan interaksi sosial belum berjalan sesuai prinsip inklusi. Berbagai data empiris ini menunjukkan adanya hambatan sistemik dalam tata kelola sekolah yang memerlukan solusi manajerial yang komprehensif.

Dengan temuan manajemen pendidikan inklusif di TK Aisyiyah 2 dan TKIT Al Kautsar yang masih menghadapi berbagai kendala tersebut, maka kajian ini sangat layak untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana manajemen pendidikan inklusif diterapkan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini. Kajian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan manajemen pendidikan inklusif serta memberikan rekomendasi praktis bagi satuan PAUD dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik pendidikan inklusif di lapangan.

Pemilihan TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung sebagai lokus penelitian didasarkan pada karakteristik unik kedua lembaga sebagai satuan PAUD yang telah berkomitmen menerapkan pendidikan inklusif, namun memiliki disparitas dalam konteks manajerial, latar kelembagaan, dan budaya organisasi. TK Aisyiyah 2 merepresentasikan lembaga PAUD berbasis organisasi kemasyarakatan dengan dukungan nilai sosial-keagamaan yang kuat di wilayah kabupaten, sementara TKIT Al Kautsar merupakan institusi swasta di lingkungan perkotaan dengan dinamika manajemen dan akses sumber daya yang berbeda. Perbedaan tipologi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan analisis komparatif yang komprehensif mengenai variasi praktik manajemen pendidikan inklusif serta melayani anak berkebutuhan khusus.

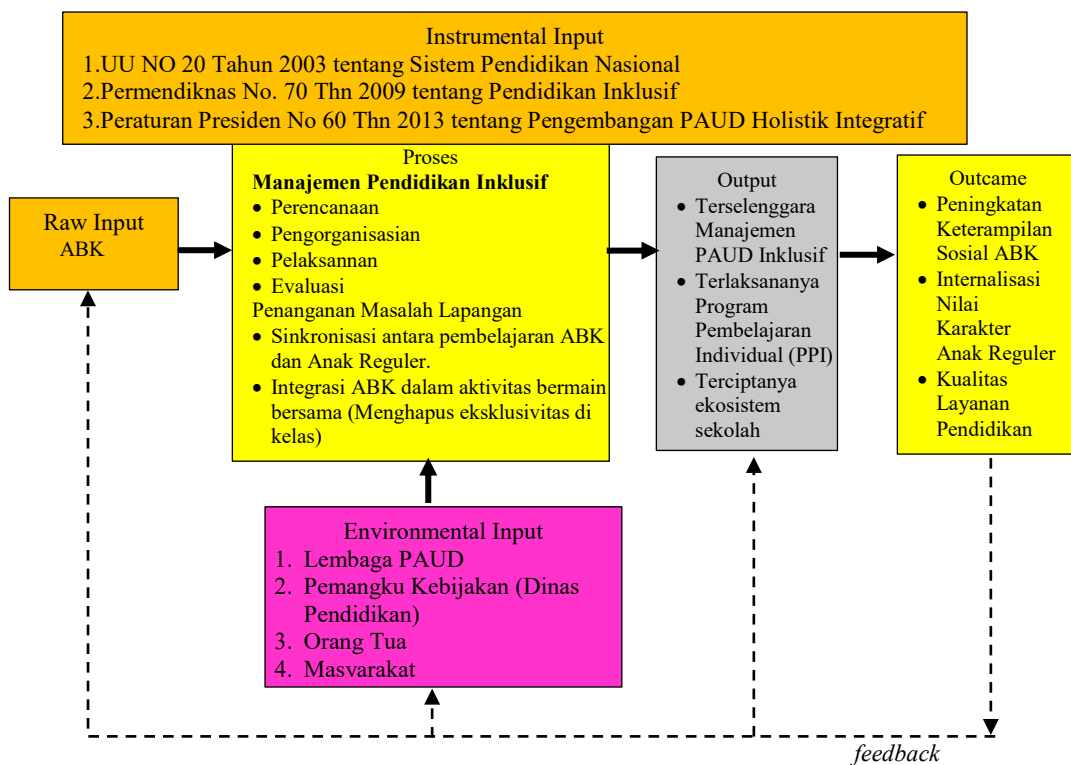
Melalui pendekatan studi kasus pada dua lokus yang kontras secara kelembagaan namun serupa dalam visi inklusi, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) diimplementasikan secara empiris dalam meningkatkan keterampilan sosial ABK. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam mengonstruksi layanan inklusi yang bermutu dan berkeadilan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, peneliti penting untuk melakukan penelitian dengan judul: “Manajemen Pendidikan Inklusif dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus pada Usia Dini (Studi Kasus di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Akar masalah pada penelitian ini bahwa keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus sangat berhubungan dengan bagaimana lembaga mengelola manajemen pendidikan inklusi. Fenomena di dua lokasi studi didapatkan bahwa manajemen pendidikan inklusi masih perlu ditingkatkan, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Manajemen Pendidikan Inklusif dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus pada Usia Dini (Studi Kasus di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung).**

Perumusan masalah dari manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus digambarkan berikut:



Secara sistematis, alur logis penelitian ini dikonstruksi melalui integrasi sistem yang saling berkesinambungan. *Raw input* dalam kajian ini adalah kondisi objektif anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki keterbatasan awal dalam keterampilan sosial. Kondisi ini dikelola melalui *Instrumental Input* yang mencakup landasan yuridis seperti UU No. 20 Tahun 2003, Permendiknas No. 70

Tahun 2009, serta Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif. Selain itu, *Environmental Input* berupa dukungan dari pemangku kebijakan, sinergitas orang tua, dan penerimaan masyarakat turut menjadi faktor pendukung keberhasilan sistem. Seluruh masukan tersebut ditransformasikan dalam bagian Proses, di mana manajemen pendidikan inklusif dioperasionalkan melalui fungsi POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*). Dalam tahap ini, fokus manajemen tidak hanya pada implementasi rutin, tetapi juga pada identifikasi kendala manajerial serta perumusan solusi strategis dalam menghadapi kasus-kasus nyata di lapangan, seperti penyesuaian kurikulum dan pengorganisasian peran guru. Proses yang sistematis ini ditargetkan untuk menghasilkan *Output* berupa peningkatan keterampilan sosial ABK yang signifikan. Pada tahap akhir, *Outcome* yang diharapkan adalah terbentuknya kemampuan adaptasi ABK yang optimal di lingkungan masyarakat, dengan mekanisme *Feedback* (umpan balik) yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan pada seluruh komponen manajemen pendidikan inklusif di masa mendatang.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan, maka penelitian tesis ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Perencanaan Pendidikan Inklusif Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Pada Usia Dini, meliputi : 1) Identifikasi; 2) Assesmen; 3) Pengembangan Program Pembelajaran Individual.
- b) Pengorganisasian Pendidikan Inklusif Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Pada Usia Dini, meliputi : 1) Penyusunan tim; 2) Pembagian tugas kerja; 3) Pengelompokan Anak yang Fleksibel; 4) Penjadwalan Program yang Terstruktur
- c) Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Dalam Meningkatkan keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Pada Usia Dini, meliputi : 1) Pembelajaran Berdiferensiasi; 2) Intervensi Keterampilan Sosial ABK; 3) Fasilitasi Interaksi Positif antar peserta didik

- d) Evaluasi Pendidikan Inklusif Dalam Meningkatkan keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Pada Usia Dini, meliputi : 1) Monitoring perkembangan ABK; 2) Evaluasi Program; 3) Penyesuaian Strategi berdasarkan hasil evaluasi.
- e) Kendala yang mempengaruhi pengembangan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus meliputi : 1) Keterbatasan asesmen kebutuhan sosial ABK ; 2) Keterbatasan guru pendamping khusus ; 3) Belum optimalnya kerja kolaboratif antar pendidik serta orang tua ; 4) Guru kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memfasilitasi interaksi sosial di kelas yang heterogen; 5) Monitoring perkembangan keterampilan sosial ABK belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- f) Solusi menghadapi kendala diperlukan penguatan manajemen pendidikan inklusif secara sistematis antara lain : 1) Sekolah perlu meningkatkan kualitas asesmen dan penyusunan PPI berbasis kebutuhan anak; 2) Dibutuhkan pembentukan tim layanan inklusif yang kolaboratif dengan pembagian peran yang jelas; 3) Mengoptimalkan kolaboratif pendidik dan orang tua; 4) Guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan strategi interaksi sosial melalui kegiatan bermain kooperatif dan pembiasaan sosial; 5) Sekolah perlu melakukan monitoring perkembangan sosial ABK secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan program inklusif.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai **Manajemen Pendidikan Inklusif dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus pada Usia Dini di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung, sehingga mampu membawa pengaruh baik untuk ABK.**

b. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara empirik tentang:

- 1) Manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi) pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung.
- 2) Kendala pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung.
- 3) Solusi menghadapi kendala pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung.
- 4) Pembaharuan pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi, memperkaya kajian ilmiah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap pengembangan teori manajemen pendidikan inklusif, khususnya dalam konteks PAUD.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga PAUD (TK Aisyiyah 2 dan TKIT Al Kautsar): Memberikan kerangka kerja dan rekomendasi strategis dalam mengelola manajemen pendidikan inklusif yang sistematis. Hasil penelitian ini dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola kurikulum, pengorganisasian SDM, dan standarisasi proses pembelajaran agar mampu melayani diversitas peserta didik secara optimal, baik bagi ABK maupun anak pada umumnya.
- 2) Bagi Dinas Pendidikan: Memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan standar manajemen pendidikan inklusif pada jenjang PAUD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam merumuskan program

pendampingan lembaga inklusi serta evaluasi efektivitas regulasi di tingkat daerah dalam menciptakan sistem pendidikan yang merata.

- 3) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Meningkatkan kompetensi manajerial dan pedagogis guru dalam mengelola kelas heterogen. Pendidik mendapatkan gambaran mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tidak hanya membantu perkembangan ABK, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi anak pada umumnya melalui pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan inklusif.
- 4) Bagi Peserta Didik (ABK dan Anak Reguler): Mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung peningkatan keterampilan sosial bagi seluruh siswa. Bagi ABK, manajemen yang baik membantu kemandirian dan adaptasi, sementara bagi anak pada umumnya, keberadaan sistem inklusif ini bermanfaat untuk mengasah kecerdasan emosional, menumbuhkan rasa empati, serta membangun sikap toleransi terhadap perbedaan sejak usia dini.
- 5) Bagi Orang Tua dan Masyarakat: Memberikan edukasi mengenai pentingnya ekosistem pendidikan inklusif yang berkualitas. Bagi orang tua, penelitian ini meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi dengan sekolah, sedangkan bagi masyarakat luas, hasil kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk membangun lingkungan sosial yang ramah anak dan nondiskriminatif melalui sinergi antara keluarga dan komunitas.

D. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi) pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung?
2. Apa saja kendala pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung?

3. Bagaimana solusi menghadapi kendala pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung?
4. Apa saja pembaharuan pendidikan inklusif dalam meningkatkan keterampilan sosial anak berkebutuhan khusus pada usia dini, di TK Aisyiyah 2 Kabupaten Bandung dan TKIT Al Kautsar Kota Bandung?